

**LAPORAN LKPJ DAN LPPD
KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN**

Jalan Raya Batakan RT. 09 Desa Panyipatan NKP 70871

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setelah tahun anggaran berakhir Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

LKPJ dan LPPD disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Maksud LKPJ - LPPD ini dibuat sebagai Pedoman bagi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan dalam mendukung segala Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan, karena Kecamatan Panyipatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat berdiri sendiri dalam pembuatan perencanaan dan pengelolaan keuangannya.

Tujuan Penyusunan LKPJ - LPPD ini adalah untuk memberikan arah bagi kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok Kecamatan Panyipatan, juga dalam rangka membantu memfasilitasi segala bentuk Aspirasi masyarakat/Stakeholders dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Landasan Hukum penyusunan LKPJ- LPPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 88).

B. Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kepala Seksi Pelayanan
4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)
6. Kepala Seksi Kemasyarakatan
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

b. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Panyipatan sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah 26 orang yang terdiri dari:

- 1. PNS : 16 orang
- 2. PTT : 10 orang

Tabel 1. Daftar PNS Menurut Pangkat / golongan dan pendidikan

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1.	Agus Setiyo, S.STP, M.M/ NIP. 19850808 200412 1 001	Pembina (IV/a)Camat	S.2
2.	Nordin , S.ST/ NIP.19650711 199203 1 012	Penata Tk.I (III/d)Sekretaris Camat	S.1
3.	Ardiansyah, AMK. / NIP. 19670411 198803 1 009	Penata Tk. I (III/d)Kasi Pelayanan	D3
4.	Jainal Abidin, SP/ NIP. 19750510 201212 1 001	Penata(III/c)Kasi Trantib	S.1
5.	Firmansyah, S.IP/ NIP. 19650221 198601 1 002	Penata TK.I (III/d)Kasi Kemasyarakatan	S.1
6.	H.Iqrar Tasdiqi. S.IP./ NIP. 19930502 201507 1 001	Penata(III/c)Kasi Tapem	S.1
7.	Zulkipli, SP / NIP. 19660312 198803 1 018	Penata Tk. I (III/d)Kasi PMD/K	S.1
8.	Nurdin, SE/ NIP. 19800101 200906 1 001	Penata Muda (III/b) Kasubbag Umum & Kepegawaian	S.1
9.	Surya Lestari,SE/ NIP.19830116 201001 2 014	Penata Muda TK.I (III/b) Kasubbag Perencanaan& Keuangan	S.1
10.	Rahmad Ridho, S.Ag/ NIP.19711201 200801 1 012	Penata (III/c)Analisis Data dan Informasi	S.1
11.	H. Darhani / NIP. 19670323 200701 1 023	Pengatur TK.I (II/d)Pengadministrasi Pemerintahan	SLTA
12.	Amid / NIP. 19681209 200701 1 022	Pengatur Muda TK.I (II/b) Pengadministrasi Umum	SLTA
13.	Maspupah/ NIP. 19710215 201406 2 001	Pengatur Muda TK.I (II/b) Pengadministrasi Umum	SLTA
14.	Sari Madinah, A.Md / NIP. 19970513 202012 2 018	Pengatur (II/c) Bendahara Pengeluaran	D3
15.	M.Bahyuni / NIP. 19700206 200701 1 028	Pengatur Tk.I (II/d) Pengadministrasi Umum	SLTA
16.	Ngarwanto / NIP. 19671012 200701 1 032	Pengatur Tk.I (II/d) Pangadministrasi Keuangan Pada Sub Perencanaan dan Keuangan	SLTA

Sumber: Subbag umum dan kepegawaian

Tabel 2.Jumlah PNS Kecamatan Panyipatan tahun 2022 berdasarkan pangkat / golongan :

NO.	PANGKAT	URAIAN		JUMLAH (ORANG)	KET
1.	Pembina	Golongan	IV / a	2	
2.	Penata Tk. I	Golongan	III / d	3	
3.	Penata	Golongan	III / c	3	
4.	Penata Muda Tk.I	Golongan	III / b	2	
5.	Penata Muda	Golongan	III / a	0	
6.	Pengatur Tk. I	Golongan	II / d	3	
7.	Pengatur	Golongan	II / c	1	
8.	Pengatur Muda Tk.I	Golongan	II / b	2	
JUMLAH				16	

Tabel 3.Jumlah PNS Kecamatan Panyipatan tahun 2022 berdasarkan kualifikasi pendidikan :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Pasca Sarjana / Strata 2 / S2	1	
2.	Sarjana / Strata 1 / S1	9	
3.	D 3	2	
4.	D 2	0	
5.	SLTA / Sederajat	4	
6.	SLTP / Sederajat	0	
JUMLAH		16	

Tabel 4. Daftar PTT Menurut Jabatan dan pendidikan

No	Nama/ NIP	Jabatan	Pendidikan
1.	Achmad Riyadhi	Pengadministrasi Kepegawaian (Pada Kesubag. Umum&Kepegwaian)	SLTA
2.	Aidi Rahman	Petugas Kebersihan	SLTA
3.	Yuyun Chintan Rokhiana Sari	Pengadministrasi Umum (Pada Seksi Tata Pemerintahan)	SLTA
4.	Siti Rahayu Rahmi	Pengadministrasi Umum (Pada Seksi Kemasyarakatan)	SLTA
5.	Sirajudin	Petugas Kebersihan	SLTA
6.	Reiza Mustari	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa/ Kelurahan)	SLTA
7.	Riska	Pengadministrasi Umum (Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban)	SLTA
8.	Isda	Pengolah Data Pelayanan (Pada Seksi Pelayanan)	S1
9.	Ratna Eka Dewi	Pengadministrasi Keuangan (Pada Sub. Bagian Perencanaan Keuangan)	S1
10.	Siti Badraya Ismiati	Pengadministrasi Keuangan (Pada Sub. Bagian Perencanaan Keuangan)	SLTA

Sumber: Subbag umum dan kepegawaian

c. Data Statistik

Kecamatan Panyipatan merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada :

114,619°– 114,825° Bujur Timur

3,88573° – 4,8015° Lintang Selatan

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kecamatan Pelaihari

Sebelah Timur : Kecamatan Jorong

Sebelah Barat : Laut Jawa dan Kec.Takisung

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Tinggi dari permukaan laut di Kecamatan Panyipatan sebagian besar :
25 - 100 meter

Luas Wilayah : 336,00 Km²
 Jumlah Desa : 10 Desa

Jarak tempuh Kecamatan Panyipatan ke pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah laut adalah 23 Km dengan waktu jarak tempuh 30 menit.
- b) Jarak pusat pemerintahan Kecamatan Panyipatan dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah 88 Km dengan waktu jarak tempuh 180 menit.

Di wilayah Kecamatan Panyipatan dengan luas wilayah 336 Km² terdapat sepuluh Desa yang dipimpin oleh kepala Desa seperti yang kami sajikan dalam tabel – tabel berikut :

Tabel 5.

Jumlah Desa di Kecamatan Panyipatan dan Luas Wilayahnya

No.	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Batakan	45,00	13,39
2.	Tanjung Dewa	42,00	12,50
3.	Kandangan Lama	60,00	17,86
4.	Kuringkit	24,00	7,14
5.	Batu Tungku	25,00	7,44
6.	Panyipatan	69,00	20,54
7.	Batu Mulya	7,50	2,23
8.	Bumi Asih	15,00	4,45
9.	Suka Ramah	17,50	5,21
10.	Kandangan Baru	31,00	9,23
Jumlah		336	100,00

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 6.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Panyipatan

No.	Desa	Rukun Tetangga (RT)	Rumah Tangga (KK)
1.	Batakan	21	2.050
2.	Tanjung Dewa	15	925
3.	Kandangan Lama	9	876
4.	Kuringkit	10	574
5.	Batu Tungku	12	832
6.	Panyipatan	15	846
7.	Batu Mulya	15	621
8.	Bumi Asih	13	593
9.	Suka Ramah	16	754
10.	Kandangan Baru	10	565
Jumlah		136	8.636

Sumber: Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

d. Demografi

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan salah satu komponen yang sangat penting adalah masyarakat / penduduk, dimana keberhasilan dari suatu pemerintahan bisa dilihat dari peran serta masyarakatnya dalam mendukung program-program serta peraturan-peraturan yang telah disusun oleh aparat pemerintah tersebut.

Masyarakat Kecamatan Panyipatan merupakan penduduk yang heterogen dengan berbagai macam suku, namun kebhinekaan ini memberikan dinamika tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Panyipatan.

Tabel 7.

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Panyipatan, 2022

No.	Desa	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010 -2022
1	Batakan	4.903	1,39
2	Tanjung Dewa	2.922	1,45
3	Kandangan Lama	2.383	2,11
4	Batu Tungku	2.585	1,80
5	Kuringkit	1.641	1,27
6	Bumi Asih	1.764	1,66
7	Batu Mulya	1.972	2,98
8	Suka Ramah	2.356	1,60
9	Panyipatan	2.823	1,46
10	Kandangan Baru	1.786	1,73
Panyipatan		25.135	1,68

Sumber : Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 8.

Jumlah penduduk Kecamatan Panyipatan

No	Desa	Jumlah		Rata-rata jiwa per Ruta
		Rumah Tangga	Penduduk	
1.	Batakan	2.015	5.571	2
2.	Tanjung Dewa	789	3.161	4
3.	Kandangan Lama	736	2.542	3
4.	Kuringkit	503	1.752	3
5.	Batu Tungku	807	2.508	3
6.	Panyipatan	713	2.509	3
7.	Batu Mulya	558	1.934	3
8.	Bumi Asih	515	1.744	3
9.	Suka Ramah	698	2.268	3
10.	Kandangan Baru	516	1.752	3
Jumlah		7.850	25.741	3,2

Sumber : Seksi Tapem Kecamatan Panyipatan

Tabel 9.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Rasio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Batakan	2.880	2.691	5.571	107
2.	Tanjung Dewa	1.626	1.535	3.161	106
3.	Kandangan Lama	1.259	1.283	2.542	98
4.	Kuringkit	889	863	1.752	103
5.	Batu Tungku	1.295	1.213	2.508	107
6.	Panyipatan	1.241	1.268	2.509	98
7.	Batu Mulya	951	983	1.934	97
8.	Bumi Asih	863	881	1.744	98
9.	Suka Ramah	1.171	1.097	2.268	107
10.	Kandangan Baru	894	858	1.752	104
Jumlah		13.069	12.672	25.741	103

Sumber : Data penduduk Kasi Tapem tahun 2022

BAB II

ARAH KEBIJAKAN UMUM SKPD

A. Visi dan Misi

Perencanaan sebagai salah satu unsur dalam proses manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan yang baik tentunya disusun melalui proses dan analisis serta berorientasi pada visi dan misi organisasi. Sistem perencanaan yang efektif sangat diperlukan karena 2 (dua) alasan yaitu (1) untuk merespon perubahan lingkungan internal dan eksternal dan (2) untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja.

Inti kegiatan perencanaan adalah penyusunan program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.

Kecamatan Panyipatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi dalam mendukung program pembangunan Bupati Tanah Laut dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksplorasi potensi-potensinya dengan optimal.

Rencana strategis Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dirumuskan dan disusun berdasarkan:

- Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023
- Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyipatan
- Dokumen-dokumen perencanaan lainnya
- Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang
- Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Proses perencanaan strategi lebih bersifat konseptual. Komponen penting dalam perencanaan strategi adalah visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Panyipatan Mengacu Pada Visi Kabupaten Yaitu **“Terwujudnya Tanah Laut yang berkarya, inovasi, tertata, religius, aktual dan sinergi (BERINTERAKSI)”**

Visi diatas dimaksudkan untuk menjadi dasar Kecamatan Panyipatan sebagai instansi pemerintah daerah yang berkompeten dan profesional dalam pelayanan publik kepada masyarakat serta dapat menciptakan hal-hal baru dalam pelayanan yang pada akhirnya mampu bersinergi dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Visi yakni Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, maka untuk pencapaiannya ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi;
4. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat;
5. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif;
6. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government);

7. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan;
8. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama;
10. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam Rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang mengacu pada renstra Kecamatan Panyipatan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat Kecamatan Panyipatan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Rencana strategi Kecamatan Panyipatan merupakan suatu upaya atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Strategi Kecamatan disusun dengan dasar pemberdayaan semua potensi, kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada serta pertimbangan kelemahan dan ancaman organisasi.

Adapun strategi Kecamatan Panyipatan dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dalam melaksanakan tugas dan pembinaan Aparatur Kecamatan serta penyempurnaan mekanisme kerja.

2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan. Standar kualifikasi aparatur, perlu peningkatan aparatur melalui pemenuhan persyaratan akademis maupun pendidikan dan pelatihan yang terstruktur.
3. Mengoptimalisasikan penggunaan sarana prasarana yang dimiliki, sebagai penunjang bagi aparatur sehingga terwujud pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mengayomi masyarakat yang tersebar merata diseluruh pelosok perdesaan.
4. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri.

Untuk menjamin rencana strategi kebijakan terlaksana dengan baik guna mencapai tujuan dan sasaran, maka disusun suatu kebijakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjabarkan ke dalam program dan kegiatan. Adapun Kebijakan yang ditempuh oleh Kecamatan Panyipatan adalah :

1. Peningkatan pemberdayaan aparatur, dengan mengikutsertakan pada berbagai kesempatan yang diminta oleh instansi pembina kepegawaian dalam penyelenggaraan diklat, kursus, sosialisasi kebijakan pemerintah, studi banding, agar wawasan, pengetahuan, keterampilan dan disiplin kerja meningkat.
2. Meningkatkan mutu kepemimpinan aparatur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, melalui pendidikan dan latihan, baik formal, penjenjangan maupun fungsional yang dikaitkan dengan pembinaan karir pegawai.
3. Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat dengan SKPD terkait untuk kemaslahatan masyarakat
4. Mengupayakan peningkatan kinerja aparatur kecamatan maupun aparatur desa
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan.

C. Prioritas SKPD

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kecamatan Panyipatan menentukan Strategi Peningkatan Kinerja sebagai prioritas SKPD untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dibidang pemberdayaan.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan

Penjelasan pengelolaan pendapatan daerah (SKPD) tahun 2022 disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.5.000.250,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0 % dari target pendapatan yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya perubahan aturan Sesuai ketentuan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa penerbitan PBG (sebelumnya di sebut IMB) dilakukan oleh DPMPTSP sehingga Kecamatan Panyipatan tidak lagi melakukan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial. Target dan realisasi pendapatan yang dicapai dirinci sebagai berikut :

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Kecamatan Panyipatan Tahun 2022

Pendapatan	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Hasil retribusi daerah	5.000.250,-	0,-	0

Sumber: Simda Penerimaan per 31 Desember 2022

B. Pengelolaan Belanja

Pengelolaan belanja daerah di Kecamatan Panyipatan di digunakan untuk membiayai belanja operasional, berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa serta belanja modal untuk mendukung pencapaian target kinerja. Rincian penggunaan belanja operasi antara lain :

a. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai disini merupakan kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 11.

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan Tahun 2022

No	Uraian Jenis Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Pegawai	2.895.230.384,	2.013.876.460,	69,55
2	Gaji pokok ASN	915.825.610,	850.643.186,	92,88
3	Tunjangan keluarga ASN	112.272.018,	102.108.638,	90,95
4	Tunjangan jabatan ASN	100.450.000,	82.890.064,	82,52
5	Tunjangan Fungsional ASN	0,	0,	0
6	Tunjangan fungsional umum ASN	23.462.250,	20.910.000,	89,12
7	Tunjangan beras ASN	58.196.712,	56.487.600,	97,06
8	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN	4.511.697,	3.188.422,	70,67
9	Pembulatan gaji ASN	33.954,	11.632	34,26
10	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.571.302	70.641.545	73,92
11	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.734.278	1.679.433	29,29
12	Iuran Jaminan Kematian ASN	17.202.834	5.038.317	29,29
13	Iuran simpanan peserta tabungan perumahan Rakyat ASN	11.946.413	0	0
10	-Tambahan Penghasilan ASN	1.224.529.903,	1.176.521.394,	96,08

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2022

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 12.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai Kecamatan
Panyipatan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	Persentase (%)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0	0,	0
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.576.676,	25.827.770,	74,7
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.089.178,	9.804.419,	97,18
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.750.000,	2.500.000,	90,91
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.784.310,	21.778.287,	99,97
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.689.166,	16.694.000	89,63
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.577.160,	15.166.565,	97,36
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.748.750,	8.736.250,	99,86
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.312.313	1.175.000,	89,54
10	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.149.550	3.075.000	97,63
11	Belanja Makanan dan	22.185.000	21.465.000,	96,75

	Minuman Rapat			
12	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.025.000,	36.150.000,	95,07
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.600.000,	45.600.000	100
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	159.600.000	159.600.000	100
15	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000	1.500.000	100
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000	22.800.000	100
17	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.000.000,	13.000.000,	100
18	Belanja Tagihan Air	0,	0,	0
19	Belanja Tagihan Listrik	27.067.816	12.919.901,	47,73
20	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	0,	0,	0
21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.920.000,	13.811.760,	99,22
22	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	840.000	547.197,	65,14
23	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.044.000	684.002,	65,52
24	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	800.000	800.000	100
25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	944.000,	944.000,	100
26	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.000.000,	53.163.712,	70,88
27	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.500.000,	17.417.640,	99,53
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,	835.000,	83,5
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,	5.844.000,	97,4
30	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.284.200	1.258.570,	98

31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	7.700.000,	7.650.000,	99,35
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.250.000,	2.510.000,	77,2
33	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000,	5.730.000,	47,7
34	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.350.000,	44.333.750,	99,96
JUMLAH		3.200.824.090, -	2.943.442.054, -	91,95

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2022

c. Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 13.

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Panyipatan Tahun 2022

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.237.038,	2.960.000	91,44
Jumlah Belanja Modal		3.237.038,	2.960.000	91,44

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2022

BAB IV

A. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKRUEAN URUSAN WAJIB

Penyelenggaraan urusan wajib SKPD dalam rangka mencapai Visi, Misi dan tujuan Kecamatan Panyipatan dalam 5 (lima) tahun, dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang ada pada RKA dan DPA.

Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 3 program dan 7 kegiatan, dan 15 sub kegiatan sesuai dengan **PERMENDAGRI 50 TAHUN 2021** yang telah ditetapkan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA SKPD Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2022.

Program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Panyipatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau

kendaraan dinas jabatan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ **Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.**

- Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

➤ **Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**

- Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional
- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ **Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (musrenbang).

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Target dari program dan kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya, baik melalui Rencana kerja (Renja) maupun RKA tahun anggaran 2022 baik itu RKA murni maupun RKA Perubahan, sebagai acuan target yang hendak dicapai oleh Kecamatan Panyipatan pada tahun anggaran 2022. Target pada Renja maupun RKA yang selanjutnya di tuangkan dalam DPA dan DPAP SKPD merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Realisasi kinerja dari program dan kegiatan yang sudah di laksanakan di Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2022 adalah :

Tabel 14.

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TA. 2022**

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase%
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			98,25 %
1	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			99,79 %
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 jenis	16 jenis	88,8 %
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50 jenis	49 jenis	99,17 %
1.3	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7 jenis	100 %
1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	12 bulan	12 bulan	100 %

	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			91,50 %
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, suber daya air dan listrik	12 bulan	11 bulan	83 %
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	10 orang	10 orang	100 %
		25 jenis	25 jenis	
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.	8 unit	8 unit	100 %
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	100 %
3.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.	25 unit	25 unit	100 %
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan			100 %

	evaluasi kinerja perangkat daerah			
4.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah.	6 dokumen	6 dokumen	100 %
4.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100 %
5	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.			100 %
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100 %
II.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100 %
6	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			100 %
6.1	Sub Kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan Nasional	50 orang	50 orang	100 %
6.2	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan	5 Peserta/orang	5 Peserta/orang	100 %

	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
III.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100 %
7.	Kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			100 %
7.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (musrenbang).	1 kali	1 kali	100 %
	Rata- rata		-	99,41 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja kecamatan panyipatan pada tahun anggaran 2022 capaian realisasi kinerja tidak ada yang dibawah 50 % dengan capaian seluruh program mencapai rata – rata 99,41 % sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum di DPA perubahan.

C. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan APBD Tahun 2022 dan APBD Perubahan 2022 dalam hal ini Belanja Operasi dan Belanja Modal, Kecamatan Panyipatan memperoleh alokasi dana Belanja sebesar Rp 4.204.061.128,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.831.532.054,00. Capaian Belanja Operasi dan Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15.

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2022**

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5
I.	BELANJA OPERASI	Rp.4.200.824.090	Rp.3.828.572.054	91,14
1	Belanja Pegawai	Rp.2.569.736.971	Rp.2.370.120.231	69,56
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 631.087.119	Rp. 573.321.823	90,85
3	Belanja Hibah	Rp.1.000.000.000	Rp. 885.130.000	88,51
II	BELANJA MODAL	Rp. 3.237.038	Rp. 2.960.000	91,44
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 3.237.038	Rp. 2.960.000	91,44
Jumlah		Rp.4.204.061.128	Rp.3.831.532.054	91,14

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2022

Belanja Operasi merupakan kegiatan rutin untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan belanja barang dan jasa serta belanja hibah. Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Panyipatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEGAWAI
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2022**

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Pegawai	4.200.824.090,	3.828.572.054,	91,14
1	Gaji pokok ASN	915.825.610,	850.643.186,	82,75
2	Tunjangan keluarga ASN	112.272.018,	102.108.638,	90,95
3	Tunjangan jabatan ASN	100.450.000,	82.890.064,	82,52
4	Tunjangan Fungsional ASN	0,	0,	0
5	Tunjangan fungsional umum ASN	23.462.250,	20.910.000,	89,12
6	Tunjangan beras ASN	58.196.712,	56.487.600,	97,06
7	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN	4.511.697,	3.188.422,	70,67
8	Pembulatan gaji ASN	33.954,	11.632,	34,26
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.571.302	70.641.545	73,92
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.734.278	1.679.433	29,29
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.202.834	5.038.317	29,29
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.946.413	0	0
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.224.529.903,	1.176.521.394,	96,08

Sumber: SIPD AKLAP per 31 Desember 2022

Total untuk anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 Rp 631.087.119,00 sedangkan untuk anggaran Hibah Rp. 1.000.000.000,-. Dari jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa tersebut terealisasi sebesar Rp 573.321.823,00 atau 90,85 % sedangkan belanja hibah

terrealisasi sebesar Rp. 885.130.000 atau 88,51%. Rincian realisasi anggaran program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.

**ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG DILAKSANAKAN KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2022**

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.144.449.667	2.888.890.604	91,87
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.374.175	3.273.315	70,50
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.034.255	2.504.115	49,74
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.339.920	769.200	32,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.736.971	2.370.120.231	92,23
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.569.736.971	2.370.120.231	92,23
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.426.700	255.475.652	90,14
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.577.160	15.166.565	97,36
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.147.756	66.591.461	99,17
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.233.423	7.324.500	59,87
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.585.000	66.578.750	90,48
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.645.134	287.060.982	94,46
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.067.816	12.919.901	47,73
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	259.993.166	258.236.959	99,32

	Kantor			
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.734.200	88.678.922	79,37%
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.500.000	42.368.472	99,69%
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	28.212.880	56,43%
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.234.200	18.097.570	94,09%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.051.980.813	936.835.250	89,05
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.051.980.813	936.835.250	89,05
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.991.863	16.780.000	98,75
1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.034.988.950	920.055.250	88,90
III.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.630.648	5.755.000	75,42
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.630.648	5.755.000	75,42
1.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.630.648	5.755.000	75,42
	Jumlah	4.204.061.128	3.831.532.054	91,14

D. Permasalahan dan Solusi

Kecamatan Panyipatan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada tahun 2022 sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat didanai disebabkan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sementara kendala yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang kurang berkompeten untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Kedepannya diharapkan dapat melakukan pelatihan / bimtek untuk meningkatkan kompetensi baik PNS maupun tenaga honorer.
2. Kekurangan fasilitas sarana dan prasarana bagi aparatur terutama Jaringan internet yang kurang memadai karena selama ini menggunakan jaringan internet seadanya serta perangkat komputer yang masih kurang, untuk tahun kedepannya akan dilakukan pengadaan terkait hal tersebut.
3. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga perlu adanya pelatihan peningkatan kompetensi aparatur Desa oleh instansi terkait.
4. Terdapat kendala dalam proses pengadaan melalui aplikasi.

Adapun solusi terkait kendala tersebut:

1. Telah diusulkan permohonan untuk pelatihan/bimtek untuk meningkatkan kompetensi baik PNS maupun Tena Honorer.
2. Telah dianggarkan pengadaan terkait jaringan internet.
3. Telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur desa oleh instansi terkait.
4. Telah melakukan pengadaan melalui Aplikasi sosialita.

1. Urusan Pilihan

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan pilihan)

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan urusan Tugas Pembantuan)

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

(Kecamatan Panyipatan tidak menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan)

BAB VII

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada dari Bab I sampai dengan Bab VI, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan pada dasarnya sudah sangat baik ini dapat dilihat dari persentase capaian dari sisi kinerja sebesar **99,41 %** dan dari sisi realisasi keuangan sebesar **91,14 %**. Capaian kinerja masih belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan karena ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi seluruhnya yaitu: Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada rekening belanja sumber daya air di kantor kecamatan yang baru tidak menggunakan jasa layanan air / PDAM .
2. Capaian total anggaran belanja Kecamatan Panyipatan sudah baik yaitu dengan persentase sebesar **91,14 %** dari total anggaran Rp 4.204.061.128,- terealisasi sebesar Rp 3.831.532.054,-
3. Capaian target untuk pendapatan tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan melainkan hanya mencapai 0 % dari target Rp 5.000.250,- terealisasi sebesar Rp.0,-

B. KEBERHASILAN/ PRESTASI/ PENGHARGAAN

Prestasi atau penghargaan yang diraih oleh Kecamatan Panyipatan selama Tahun 2022 adalah dari kegiatan tim penggerak PKK Kecamatan Panyipatan yang meraih penghargaan di Tingkat Kabupaten. Penghargaan tersebut antara lain :

Penghargaan Tingkat Kabupaten, terdiri dari :

- 1) Juara harapan I Lomba Menu UP2K tingkat kabupaten tanah laut yang diadakan oleh TP.PKK Kabupaten Tanah- Laut.

- 2) Juara 2 Lomba merangkai buah dan sayur dalam rangka acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang diselenggarakan oleh TP.PKK Kabupaten Tanah- Laut.
- 3) Juara harapan I Lomba B2SA yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerjasama dengan TP.PKK Kabupaten Tanah- Laut.
- 4) Juara II Lomba Paduan suara pada acara Jambore Kader yang diselenggarakan oleh TP.PKK Kabupaten Tanah- Laut.
- 5) Juara III Inovasi pakan konsentrat dan pelet dari limbah tongkol jagung dari Kelompok Tani Tunggal Jaya Bersanma Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan diselenggarakan oleh Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut.
- 6) Pemberian penghargaan desa dengan status mandiri Tahun 2022 kepada Masduki Kepala Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan diselenggarakan oleh Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut.
- 7) Mendapatkan Prestasi-Prestasi pada Lomba MTQ Ke-44 Tingkat Kabupaten Tanah Laut.

Demikian laporan LKPJ dan LPPD Kecamatan Panyipatan ini disusun dan dibuat berdasarkan kondisi yang ada saat ini, tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam partisipasinya sehingga tersusunnya laporan ini sesuai waktu yang ditentukan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah Kabupaten Tanah Laut.


CAMAT PANYIPATAN,
Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, M.I.P
NIP.19870617 200602 1 001

**Juara harapan I Lomba UP2K tingkat kabupaten tanah laut diwakili oleh
Desa Kandungan Baru Tahun 2022**



**Juara 2 Lomba merangkai buah dan sayur dalam rangka acara Hari
Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2022**



Juara harapan I Lomba B2SA Tahun 2022



Juara II Lomba Paduan suara pada acara Jambore Kader Tahun 2022



Juara III Inovasi pakan konsentrat dan pelet dari limbah tongkol jagung dari kelompok tani tunggal jaya bersama Desa bumi Asih Kecamatan Panyipatan.



Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2022 Kepada Masduki Kepala Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan.





MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : 5540/KPG.02.06/2022

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DESA DENGAN STATUS MANDIRI TAHUN 2022

MENGANUGERAHKAN

LENCANA DESA MANDIRI



KEPADA :

MASDUKI

KEPALA DESA BATU MULYA
KECAMATAN PANYIPATAN, KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ATAS KOMITMEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI

JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Desa Bisa



Dr. (H.C.) Drs. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.

Prestasi-Prestasi pada Lomba MTQ Ke-44 Tingkat Kabupaten Tanah Laut.



Prestasi yang diraih oleh kontingen Kecamatan Panyipatan :

No.	NAMA	CABANG	GOLONGAN	KATE GORI	JUARA
1.	Nur Qayyimah	Tilawah Al Qur'an	Tartil	Puteri	Harapan 2
2.	Risti Alya Zahra	sda	Anak	Puteri	Harapan 3
3.	Uswatun Hasanah	sda	Remaja	Puteri	Harapan 2
4.	Patimatul Aliyah	sda	Dewasa	Puteri	Harapan 2
5.	Hafis Anshari	sda	Qiraat Murattal Dewasa	Putera	Juara 3
6.	Ahmad Muzakir	sda	Qiraat Mujawwad Dewasa	Putera	Juara 2
7.	Ma'rifah	sda	Sda	Puteri	Juara 2
8.	Najma Masruroh	Hifdzil Qur'an	5 juz dan tilawah	Puteri	Juara 3
9.	Ani Arsinah Nispi Zulfiana Eka Ismatul	Syarhil Al Qur'an	Regu/ Group	Puteri	Juara 1
10.	Harvando Farel Akhdan	Khat Al Qur'an	Hiasan Mushaf	Putera	Harapan 2
11.	Halimatussa'diah	Khat Al Qur'an	Hiasan Mushaf	Puteri	Harapan 2
12.	Yuli Safitri	sda	Dekorasi	Puteri	Juara 3
13.	Septi Sulistiani	KTIQ		Puteri	Harapan 3
14.	Ahmad Hadi Subarkah	Hapalan Hadits	100 Hadits	Putera	Harapan 1
15.	Noor Liani	sda	100 Hadits	Puteri	Juara 2
16.	Hairul Amin	sda	500 Hadits	Putera	Harapan 2
17.	Nalita Hajar Aswad	sda	500 Hadits	Puteri	Harapan 2
18.	Peringkat Kecamatan				NO. 8

Keterangan :

Juara 1 : 1 Group

Juara 2 : 3 Orang

Juara 3 : 3 Orang

Harapan 1 : 1 Orang

Harapan 2 : 7 Orang

Harapan 3 : 2 Orang